

# KAJIAN KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Mardhotillah Astri<sup>1)</sup>, Ir. Hamdi Nur, S.T, M.TP<sup>2)</sup>, Wenny Widya Wahyudi, S.P, M.Si<sup>3)</sup>

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Universitas Bung Hatta

Email : [mardhotillahastri@gmail.com](mailto:mardhotillahastri@gmail.com)<sup>(1)</sup>, [hamdinur66@gmail.com](mailto:hamdinur66@gmail.com)<sup>(2)</sup>, [wennywidyaw@bunghatta.ac.id](mailto:wennywidyaw@bunghatta.ac.id)<sup>(3)</sup>

## PENDAHULUAN

Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah, karena adanya perbedaan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*) (Syafriзал, 2012). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah, ketimpangan yaitu kemiskinan yang parah.

Dua hal terpenting dalam pembangunan adalah pertumbuhan dan pemerataan, ketika belum tercapai maka akan timbul suatu ketimpangan kesenjangan atau ketimpangan (Sirojuzilam, 2005). Pertumbuhan ekonomi yang negatif di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 menandakan tidak tercapainya pertumbuhan. Selain itu, dari sisi pendapatan perkapita tertinggi berada di Kota Padang Panjang 49,95 juta rupiah sementara pendapatan perkapita terendah di Kabupaten Pesisir Selatan 18,78 juta rupiah. Data tersebut menunjukkan adanya selisih yang cukup jauh dari kedua wilayah tersebut, dan masih terdapat kabupaten yang memiliki pendapatan perkapita dibawah pendapatan perkapita di provinsi. Selisih yang cukup jauh inilah yang menandakan adanya ketimpangan.

Ketimpangan jika dibiarkan akan semakin melebar dan akan semakin parah, hingga menghambat pembangunan di suatu wilayah untuk berkembang. Berdasarkan alasan tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “Kajian Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat”. Dalam penelitian ini, sebelum mengkaji ketimpangan terlebih dahulu perlu mengetahui kondisi perekonomian dari tiap kabupaten dan kota kemudian barulah dikaji mengenai ketimpangannya.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, deskriptif untuk memberikan gambaran atau kesimpulan melalui narasi dan tabel, sedangkan kuantitatif digunakan untuk perhitungan statistik sederhana. Diawali dengan identifikasi ekonomi menghitung kontribusi sektor lapangan usaha kemudian dikelompokkan menjadi 3 kelompok sektor (primer, sekunder, tersier) dan klasifikasi wilayah menggunakan Tipologi Klassen.

$$\text{Kontribusi sektor} = \frac{\text{PDRB lapangan usaha } i \text{ di kab/kota}}{\text{PDRB kab/kota}} \times 100$$

Ketimpangan tingkat provinsi menggunakan Indeks Williamson, sedangkan untuk ketimpangan kabupaten kota dilihat melalui selisih pendapatan perkapita kabupaten kota dengan rata-rata provinsi.

$$\text{Indeks Williamson} = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2 / n}{\bar{y}}}$$

Keterangan :

$Y_i$  = PDRB Perkapita Kabupaten/Kota

$Y$  = PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat

$F$  = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota

$n$  = Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat

$$\text{Selisih Pendapatan Perkapita} = Y_i - Y$$

Keterangan :

$Y_i$  = PDRB Perkapita Kabupaten/Kota

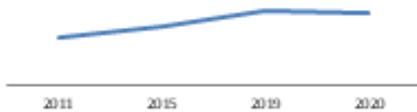
$Y$  = PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Cakupan wilayah dalam penelitian ini adalah 12 kabupaten dan 7 kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, dengan titik tahun pengamatan 2011, 2015, 2019 dan 2020. Kontribusi sektor di tiap wilayah ada yang tetap berasal dari satu sektor dan ada yang mengalami perubahan sektor. Kemudian ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat namun masih dalam kategori ketimpangan yang rendah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diketahui ketimpangan antar kabupaten

kota, yang dilihat dari selisih pendapatan perkapita kabupaten kota terhadap provinsi di setiap tahun maka membentuk grafik yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa pola sebagai berikut.

1) Wilayah Pola I yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan seluruh kota. Wilayah ini memiliki pendapatan perkapita lebih besar dibandingkan rata-rata provinsi sehingga dikatakan tidak timpang



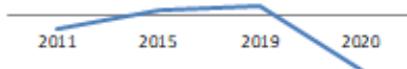
Gambar 1. Grafik Selisih Pendapatan Perkapita Pola I

2) Wilayah Pola II yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat dengan bentuk grafik sebagai berikut



Gambar 2. Grafik Selisih Pendapatan Perkapita Pola II

3) Wilayah Pola III yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Dharmasraya dengan bentuk grafik sebagai berikut.



Gambar 3. Grafik Selisih Pendapatan Perkapita Kabupaten Padang Pariaman



Gambar 4. Grafik Selisih Pendapatan Perkapita Kabupaten Dharmasraya

Terdapat hubungan antara ketimpangan dengan hasil analisis kontribusi sektor yaitu ketimpangan memiliki hubungan yang searah dengan sektor Primer sedangkan dengan sektor Tersier berlawanan arah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan kontribusi sektor di wilayah ada yang tetap berasal dari satu sektor yang sama yaitu sektor Primer atau

sektor Tersier, dan ada pula wilayah yang mengalami perubahan sektor dari Primer ke Tersier. Dari klasifikasi wilayah terdapat wilayah yang menempati klasifikasi yang sama dan ada pula yang berubah pada tahun 2011-2020. Berdasarkan analisis diketahui bahwa ketimpangan hanya terjadi di wilayah kabupaten yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih kecil dibandingkan rata-rata provinsi. Jika dikaitkan dengan kontribusi sektor di kabupaten kota, ternyata ketimpangan memiliki hubungan yang searah dengan sektor Primer dan berlawanan arah dengan sektor Tersier.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amala, Ritmon dan Abdul Rauf Malayang. 2018. "Analisis Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Se-Sulawesi". Gorontalo : Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 14 No 42 IAIN Sultan Amai Gorontalo
- [2] Ikhsan, Easbi dan Nadra Yudelsa Ratu. 2020. "Struktur Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Sumatera Barat". Sumatera Barat : Jurnal Pembangunan Nagari Balitbang Sumatera Barat
- [3] Ilham, Muhammad. 2015. "Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2011 – 2015". Yogyakarta : Jurnal Bumi Indonesia, Perpustakaan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
- [4] Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada.
- [5] Rustiadi Ernan, dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Cetakan ke 2*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia